



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD MAKSUM
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA
3. NHK : 210091

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 277.136.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 274 m2/200 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 277.136.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 56.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Z Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
5. MOBIL, OPEL BLAZER DOHC Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 21.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.867.050

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 358.503.050

III. HUTANG Rp. 79.200.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 279.303.050

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.